

**EVALUASI KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**KHAIRUL FATTA
NIM. 190802111**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Fatta
NIM : 190802111
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Aceh Selatan, 12 April 2002
Alamat : Desa Kuta Baro Kec Meukek Kab. Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

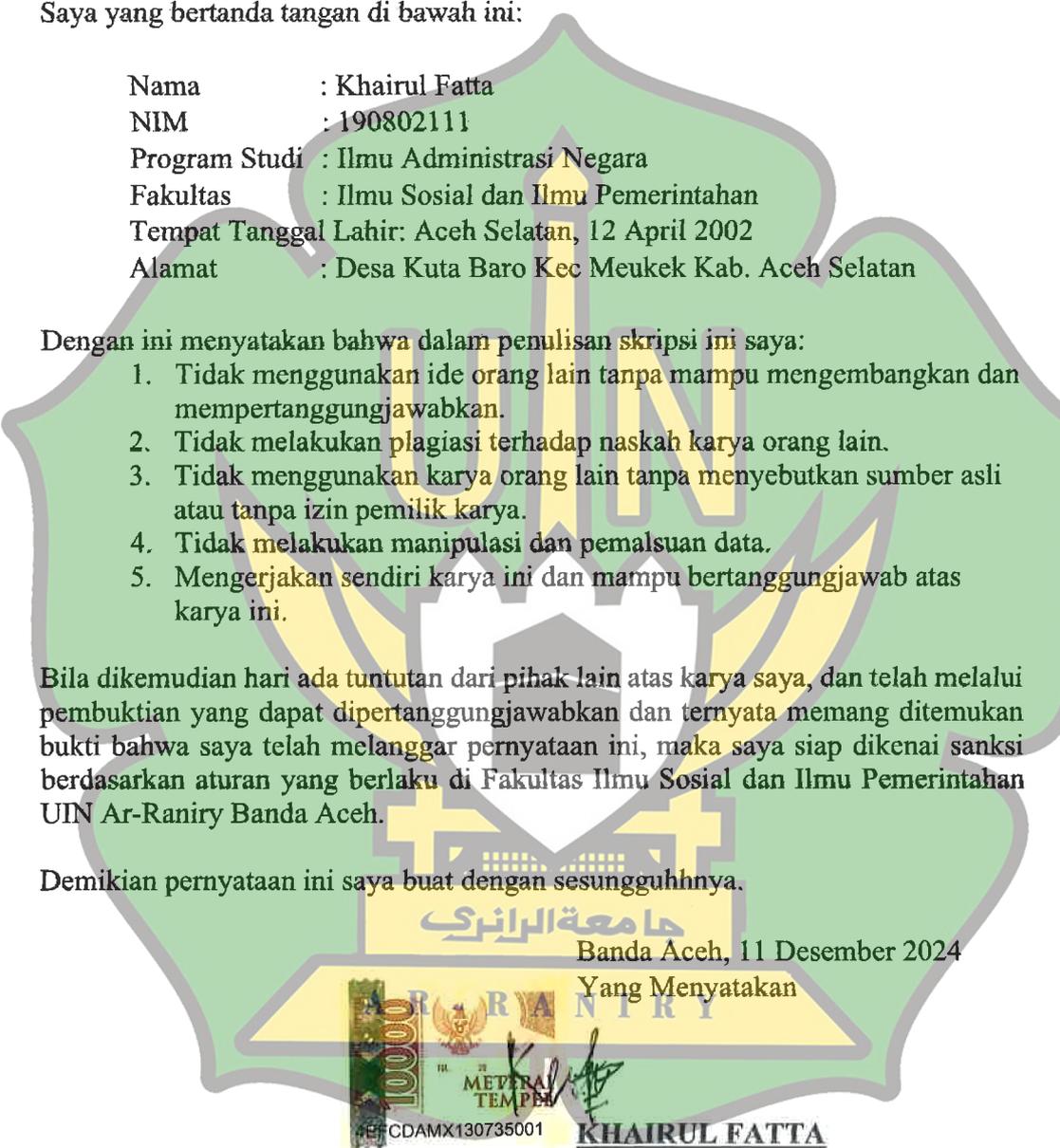
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2024

Yang Menyatakan


 
KHAIRUL FATTA
NIM. 190802111

**EVALUASI KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**KHAIRUL FATTA
NIM. 190802111**

**Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disetujui untuk Di Munaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

03/07 025
Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

06/01 -25
Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19890518202321103

**EVALUASI KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

KHAIRUL FATTA
NIM. 190802111

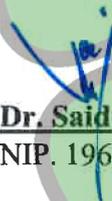
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19890518202321103

Penguji I,

Penguji II,


Muazzinah, B.Sc., M.P.A
NIP. 198411252019032012


Dicky Izmi Yahputra, S.IP., M.IP., M.P.A
NIP.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S. Ag., M. Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Subsidi BBM adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN. Kendala dalam distribusi subsidi BBM sering terjadi akibat tindakan penimbunan dan penjualan oleh pihak-pihak tertentu dengan harga yang lebih tinggi. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas kebijakan subsidi BBM dan faktor-faktor yang menghambat evaluasi kebijakan di Kabupaten Aceh Selatan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan subsidi BBM secara efektif memberikan manfaat langsung pada masyarakat walau sering terjadi kekurangan pasokan. Distribusi manfaatnya sudah merata, namun kesadaran tentang keberlanjutan jangka panjang tersebut masih minim. Penyalahgunaan yang sering terjadi menjadi penghambat utama. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dalam mengurangi biaya bahan bakar, meningkatkan daya beli, dan mengurangi tekanan ekonomi. Namun, evaluasi kebijakan dihambat oleh beberapa faktor seperti data yang tidak akurat, minimnya koordinasi, dan ketergantungan pada sistem manual serta adanya kepentingan pribadi dan kelompok.

Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak (BBM), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Subsidi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Evaluasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di Kabupaten Aceh Selatan”. Shalawat beserta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga proposal penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ibu Muazzinah, M.P.A. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Dr. Taufik, M.Si. Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Para Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
7. Kepada kedua orang tua, dan keluarga, terima kasih atas doa, nasehat dan bimbingannya, serta kasih sayang yang selalu diberikan;
8. Serta seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Administrasi Negara atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 11 Desember 2024
Peneliti

A R - R A N I R Y

Khairul Fatta
190802111

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Evaluasi Kebijakan	8
2.1.2 Aktor Evaluasi Kebijakan.....	10
2.1.3 Model Evaluasi Kebijakan.....	17
2.2 Penelitian Relevan	26
2.3 Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Fokus Penelitian	36

3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Informan Penelitian	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan	43
4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Selatan	43
4.1.2 Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Selatan .	46
4.2 Evaluasi Bahan Bakar Minyak subsidi di Kabupaten Aceh Selatan	48
4.2.1 Efektivitas dan Efisiensi	49
4.2.2 Kecukupan	51
4.2.3 Perataan	43
4.2.4 Responsivitas	56
4.2.5 Ketepatan	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran	74

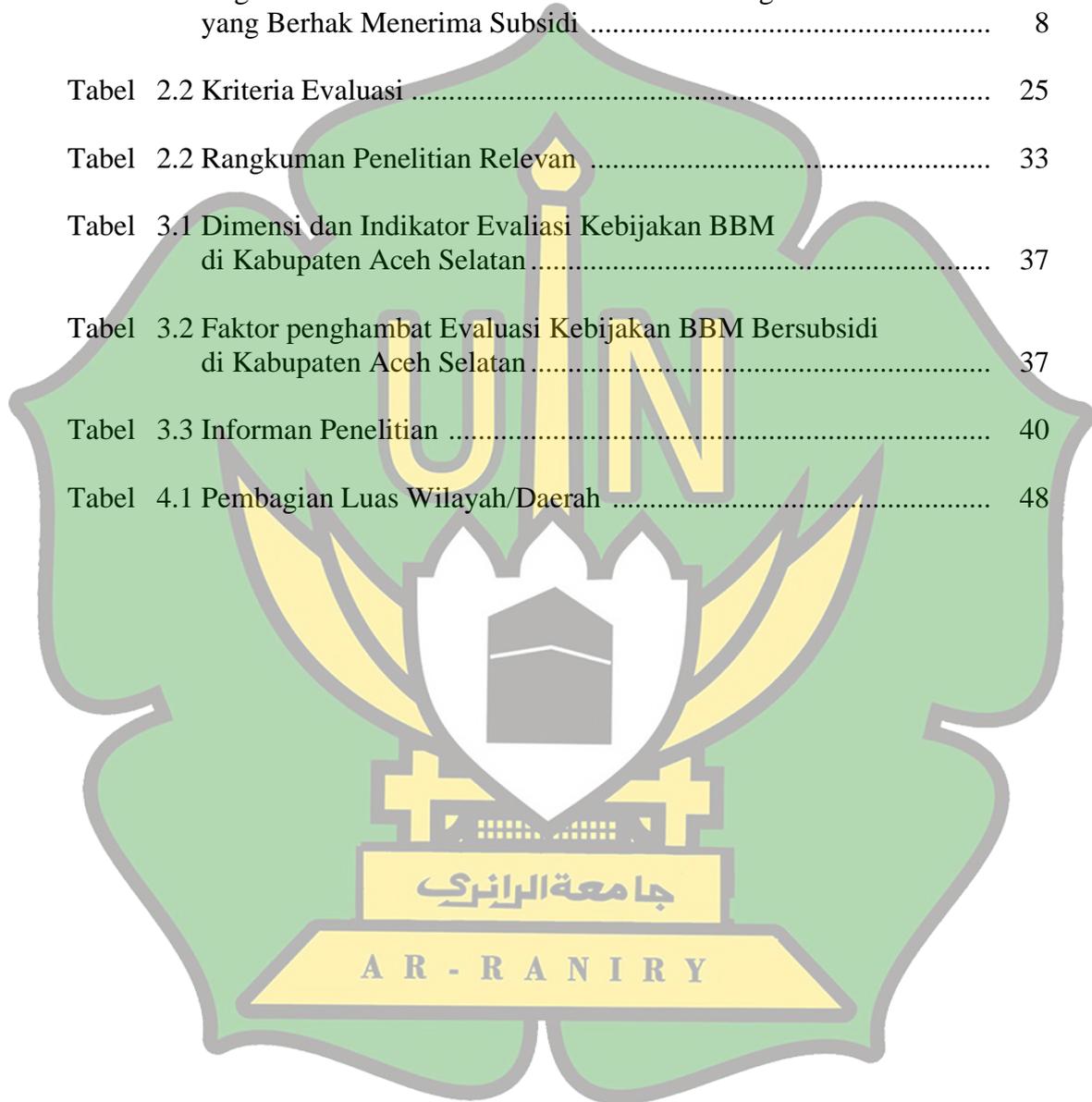
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

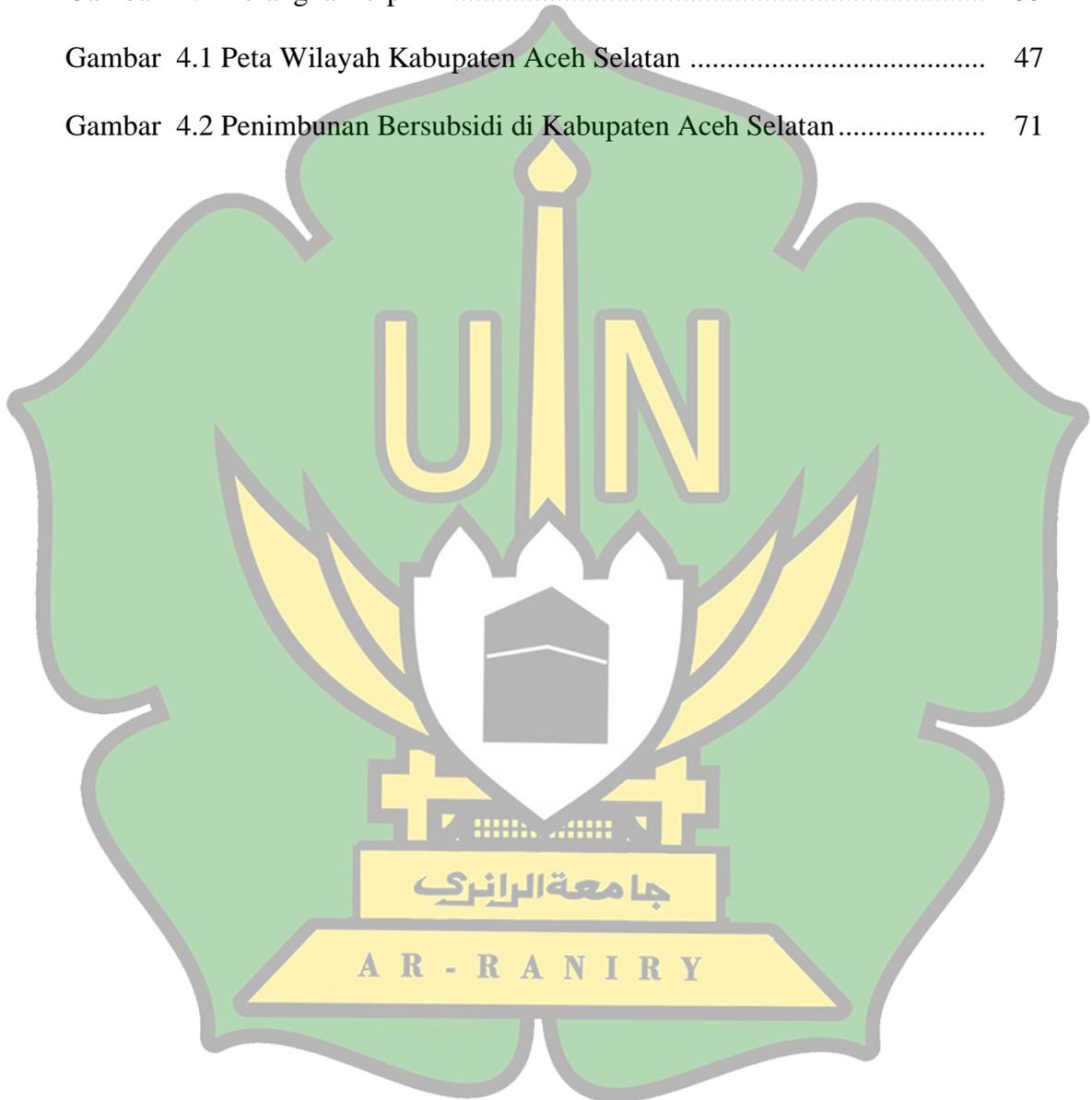
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Regulasi Penentuan BBM Bersubsidi dan Kategori Pihak yang Berhak Menerima Subsidi	8
Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi	25
Tabel 2.2 Rangkuman Penelitian Relevan	33
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Evaluasi Kebijakan BBM di Kabupaten Aceh Selatan	37
Tabel 3.2 Faktor penghambat Evaluasi Kebijakan BBM Bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan	37
Tabel 3.3 Informan Penelitian	40
Tabel 4.1 Pembagian Luas Wilayah/Daerah	48



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	35
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Aceh Selatan	47
Gambar 4.2 Penimbunan Bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Sudah Penelitian

Lampiran 4 Instrumen Penelitian

Lampiran 5 Resume Hasil Penelitian

Lampiran 6 Foto Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia menyediakan subsidi untuk beberapa jenis bahan bakar minyak melalui dana APBN, yang berperan langsung dalam penetapan harga dan distribusi BBM Pertamina di pasar dalam negeri. Subsidi tersebut spesifik untuk produk tertentu, yakni Pertalite yang merupakan bensin dengan oktan 90 dan Biosolar yang adalah diesel dengan indeks setana 48. Harga kedua jenis BBM ini lebih murah dibandingkan harga pasar umum dan penjualannya juga dikontrol melalui sistem kuota serta hanya tersedia bagi kelompok-kelompok tertentu.¹

Kebijakan subsidi merupakan instrumen vital untuk mendukung proses pembangunan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengakses layanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Melalui pemberian subsidi bahan bakar, masyarakat dapat mengalokasikan pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain seperti pangan, pendidikan, rekreasi, dan sebagainya. Pemerintah memberikan subsidi ini agar daya beli masyarakat tetap terjaga, membantu mempercepat pemulihan konsumsi keluarga, serta memelihara kestabilan tingkat inflasi.

Aturan tentang penggunaan BBM bersubsidi dalam sektor transportasi darat diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yang mencakup ketentuan untuk

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara.

kendaraan pribadi roda empat. Kendaraan ini dapat mengakses BBM bersubsidi tanpa memerlukan dokumen administratif tambahan.²

BPH MIGAS mengalami kesulitan dalam mengawasi distribusi bahan bakar subsidi. Contohnya, kuota solar subsidi tahun 2020 sebanyak 15.310.000 kilo liter yang seharusnya dialokasikan untuk sektor transportasi, perikanan, pertanian, dan usaha mikro masing-masing 1%, tidak bisa diawasi secara efektif. BPH Migas hanya mampu memonitor pemakaian solar subsidi pada sektor transportasi, perikanan, dan layanan umum, namun tidak pada sektor-sektor lain.

Menurut data dari BPH MIGAS tahun 2020, total alokasi subsidi untuk solar pada lima sektor adalah sebesar 15.310.000 kilo liter selama tahun itu. Berdasarkan surat nomor 3. Peng/KM.05/SBPH/2022 dari BPH MIGAS tertanggal 1 April 2022, yang merupakan tanggapan terhadap permohonan informasi, tercatat bahwa realisasi pemanfaatan subsidi solar di tahun 2020 mencapai 14.006.852 kilo liter atau 91% dari total kuota. Lebih rinci, sektor transportasi mencatatkan penggunaan sebesar 12.895.148 kg, melebihi batas kuota yang ditetapkan sebesar 11.561.331 kg. Demikian juga dengan transportasi laut yang menggunakan 594.854 kg, melebihi kuota tahunannya yang 524.926 kg. Akan tetapi, sektor perikanan hanya memanfaatkan 27% dari kuota yang diberikan, yaitu 516.394 kg dari total 1.921.155 kg, menunjukkan adanya kesulitan yang dihadapi nelayan dalam mengakses subsidi solar.³

² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Diakses dari <https://www.esdm.go.id>

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Evaluasi Program Subsidi BBM untuk Nelayan*. Diakses dari <https://www.kkp.go.id>

Terkait dengan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Aceh, Pejabat Gubernur telah merilis Surat Edaran (SE) Nomor 542/21981 yang mengatur kontrol distribusi BBM bersubsidi jenis solar (Bio Solar) di area Aceh. Surat edaran ini, yang bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Pengadaan, Pendistribusian dan Harga Eceran BBM, menargetkan pengaturan distribusi yang adil dan sesuai kuota untuk Bio Solar subsidi agar mencapai sasaran yang ditetapkan dengan efisien.

Terkait dengan soal penyaluran BBM bersubsidi yang tak teratur di Aceh Selatan, Satreskrim Polres Aceh Selatan berhasil menangkap FD (32) dan DH (25) atas dugaan membawa BBM bersubsidi di SPBU Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Kapolres Aceh Selatan, AKBP Nova Suryandaru, mengatakan bahwa penangkapan itu berawal dari laporan warga mengenai sebuah mobil carry picup di SPBU Tapaktuan. Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat bergerak cepat melakukan penyelidikan dan mendapati mobil tersebut sedang mengisi BBM jenis solar sebanyak 1.320 liter dalam empat puluh jerigen. Kedua tersangka beserta barang bukti, yang meliputi satu mobil mega carry pickup dan empat puluh jerigen berisi solar, kini telah diamankan di Polres Aceh Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.⁴

Selanjutnya kasus kebijakan BBM subsidi di Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Personel Kepolisian Sektor (Polsek) Trumon Timur juga mengamankan sebuah mobil *pickup* bermuatan BBM subsidi jenis pertalite. Selain

⁴ Dikutip dari <https://www.acehonline.co/news/polres-aceh-selatan-tangkap-pengangkut-bbm-subsidi-satu-ton-lebih-solar-disita/index.html>, pada Desember 2023

mengamankan mobil dan ratusan liter BBM Peralite, polisi juga mengamankan seorang tersangka berinisial PA (37) warga Kecamatan Pasie Raja. Kapolres Aceh Selatan melalui Kapolsek Trumon Timur Iptu Adrizal melakukan penangkapan di Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, saat polisi sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Trumon Timur.⁵ Dari penangkapan ini, polisi mengamankan 20 jerigen peralite dengan total 640 liter dan delapan jerigen kosong yang isinya sudah dijual oleh tersangka di dalam mobil *carry pickup*. Minyak subsidi tersebut dibeli di SPBU Seunebuk, Kecamatan Pasieraja, dengan cara dilansir menggunakan 4 unit sepeda motor.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin mengeksplorasi secara mendalam tentang kebijakan subsidi BBM yang diterapkan di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas kebijakan tersebut, dampak terhadap masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah

Proses mengidentifikasi masalah merupakan langkah utama dalam penelitian, selain dari membahas latar belakang dan merumuskan masalah yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menemukan beberapa isu yang akan dijadikan fokus dalam penelitian mendatang. Analisis

⁵ Dikutip dari <https://seputaraceh.id/2023/05/16/sedang-patroli-polisi-tangkap-pick-up-bermuatan-bbm-subsidi-di-aceh-selatan>

⁶ Dikutip dari https://www.rmolaceh.id/polres-aceh-selatan-ungkap-kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi?utm_source=chatgpt.com

terhadap subsidi BBM dijalankan untuk mengungkap perbedaan antara regulasi dan implementasi kebijakan subsidi BBM, serta memaparkan faktor-faktor penghalang yang menyulitkan dalam mengakses subsidi BBM, bersama dengan rekomendasi solusi untuk mengatasi kendala dan masalah dalam memperoleh subsidi BBM.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Kebijakan BBM Bersubsidi belum efektif dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa faktor penghambat Evaluasi Kebijakan BBM Bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Kebijakan BBM Bersubsidi yang belum efektif dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Evaluasi Kebijakan BBM Bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian Teoritis
 - a. Menjadi sangat bermanfaat bagi peneliti untuk memperluas wawasan mereka, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara yang mengulas

tentang penilaian penggunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi di daerah Kabupaten Aceh Selatan.

b. Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana mekanisme Evaluasi Kebijakan BBM Bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan.

2. Kegunaan Penelitian Praktis

- a. Studi ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman.
- b. Sebagai materi penelitian khusus di bidang Ilmu Administrasi Negara.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti masa depan yang hendak mengeksplorasi bidang serupa, guna mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan lebih lanjut.

